



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 26/PID.SUS -TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**
Tempat lahir : Rumbio
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 27 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jalan Trimas Gg.Trimas Sakti No.25 Kelurahan
Tembilahan
Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
Pendidikan : D3 (Diploma tiga)

Dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;
- 7 Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
- 8 Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 21 Agustus 2015;

Hal.1 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;
- 10 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;
- 11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr.H.EDWAR, SH.MH** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Dr.H.EDWAR, SH.MH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Baharudin Yusuf No.10 Tembilahan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 04Juni 2015, dengan Nomor : 593/SK/TPK/2015 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 26/PID.SUS-TPK /2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pekanbaru tanggal 1 September 2015 Nomor : 52/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS – 04/TMBIL/05/2015, tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa **terdakwaNURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan staf pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 bersama-sama denganIr. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.166/ III/HK-2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012,Ir.MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, SULASMI Binti H.SAMSUDIN, MUHAMMAD FADHIL,SE Als FADHIL Bin TABRI, YAYA DAMAYANTI Als YAYA Binti LISGANI Selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Bunga No.12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 pengesahan tanggal 8 November 2012 kegiatan/ pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kab. Inhil. Bahwa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / pihak ketiga sebagai berikut :

Hal.3 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
 2. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
 4. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan tugas dan tanggung jawab :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN membuat 2 (dua) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT lengkap Nomor : 40/UMD-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dan Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT lengkap Nomor : 41/UHM-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dibuat pada tanggal dan bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2012, namun ke 2 (dua) proposal tersebut dibuat tertanggal 12 November 2011 supaya seolah-olah pengajuan dan pembuatan proposal dibuat dan diajukan pada tahun 2011 untuk diserahkan kepada Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG untuk diproses;
 - Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A membuat Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI atas perintah KARTIKA RONI sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN mengusulkan kepada GUNTUR AS Bin MUKMIN A tentang Struktur Ketua dan Sekretaris dalam kepengurusan Kelompok Usaha Bersama tersebut, namun dalam kenyataannya Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI tidak ada Ketua dan Anggotanya;

- Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A menyiapkan administrasi Surat Penawaran beserta lampirannya yaitu :

1. Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak Pajabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA.2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
4. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
6. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5

Hal.5 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;

7. Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
8. Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
- Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A setelah selesai membuat administrasi bertemu dengan SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dalam kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);
- Bahwa Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memerintahkan kepada SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN untuk segera memproses kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);
- Bahwa terhadap DPPA-SKPD tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523 / DKP – Set / 2012 / 592. Diantara penerima hibah barang tersebut adalah Kelompok Nelayan Usaha Hikmah Mandiri (Desa Concong Luar) dan Kelompok Nelayan Usaha Mandiri Sejahtera (Desa Panglima Raja), masing-masing kelompok akan mendapatkan Kapal Motor 5 GT dan Gill Net 30 Piece dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun demikian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat Nomor :904/DKP-KP/P4/VIII/2012 /64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 kepada SYAFRIZAL,A.Md Als IJAL Bin FACHRUDIN;

- Bahwa SYAFRIZAL,A.Md Als IJAL Bin FACHRUDIN setelah menerima surat Nomor :904/DKP-KP/P4/VIII/2012 /64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar kecamatan Concong Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 membuat dan melaksanakan:

1. Mengirimkan undangan kepada Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor : 19 /PPBBJ/DKP-KP /P4/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
2. Daftar pengambilan dokumen pengadaan langsung oleh Direktur kepada pejabat pengadaan dengan surat nomor 60 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam surat nomor 60 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
3. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

Hal.7 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing yaitu BUDI RAHARJO;
5. Memberikan penjelasan pekerjaan / Anwijzing kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai dan membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor: 101 /PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor: 101 /PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
6. Pemasukan Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor : 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Perihal Penawaran paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
7. Berita acara pembukaan penawaran CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor:183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
8. Undangan untuk Evaluasi penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi harga,Nomor : 224 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 265 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/ 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 265 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/ 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
10. Membuat Berita Acara Hasil pengadaan Langsung Nomor :306/ PPBJ-/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 24 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 11. Penetapan Pemenang untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebagai Penyedia Barang : Dengan nomor surat, Nomor: 347/ TPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Indragiri Hilir di Tembilahan, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 12. Pengumuman Pengadaan langsung: Dengan Surat Nomor :388/PPBJ, /DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan (Dana APBD) di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 - Bahwa Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 yaitu BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 nilai kontrak sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dihitung sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;

Hal.9 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI ditetapkan sebagai penyedia barang, tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil sebagaimana yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa SULASMI selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris bersama sama dengan YAYA DAMAYANTI selaku Anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, dengan tugas dan wewenang yaitu :
 - 1 Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam kontrak.
 - 2 Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - 3 Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - 4 Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan
- Bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI mengirimkan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03 / NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/ NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 telah mencapai pekerjaan dengan bobot 100 % (seratus persen) dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa kemudian SULASMI selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris bersama-sama dengan YAYA DAMAYANTI selaku Anggota melakukan pemeriksaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dilaksanakan oleh CV.NYIUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA PERMAI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012;

- Bahwa pada Bulan Desember 2012, Tim Penitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan di dampingi GUNTUR AS Bin MUKMIN A melakukan pemeriksaan lapangan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di tempat Pembuatan Kapal tepatnya di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada kenyataannya dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tidak dapat memberikan dan atau menunjukan dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012, namun demikian Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tetap mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 04 / NNP – RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan sehingga dikeluarkanlah Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Tim PPHP dan Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tanda tangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A;
 - Bahwa Berdasarkan Surat Nomor : 06 / NNP-RGT/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong atas Nama BUDI RAHARJO selaku direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, selanjutnya GUNTUR AS Bin MUKMIN A mengirimkan surat kepada terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa kemudian terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan administrasi Pembayaran antara lain :
1. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012.

Hal.11 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012.
 3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014.
 4. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012.
 5. Spesifikasi teknis Kegiatan.
 6. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan pekerjaan.
 7. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS).
 8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengetahui adanya kekurangan spesifikasi berupa dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan pemeriksaan di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis, atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menerbitkan Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012 .
 - Bahwa perbuatan terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO, Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG, GUNTUR AS Bin MUKMIN A, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL dan YAYA DAMAYANTI melanggar ketentuan sebagai berikut :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) angka :
 - 1 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;**
 - 2 Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;**
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) berbunyi:

“pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 60 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 6 yaitu :
“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadaan barang/jasa

e Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa

g Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) berbunyi:
“Keuagandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”

Hal.13 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) berbunyi:
“Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) berbunyi:
“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (2) berbunyi:
“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”
- Bahwa Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipotong PPN 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 11.205.318,00 (sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan PPN pasal 22 2 % (dua persen) sebesar Rp.1.680.798,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menjadi sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan melampirkan dokumen antara lain :
 1. Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012
 3. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
 4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014
 5. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012
 6. Spesifikasi teknis Kegiatan



7. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan pekerjaan.
 8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung(LS)
 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah;
 10. Surat Kelengkapan Dokumen Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
 11. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
 12. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.123.258.500 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Hj.JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos, MM menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11394/SP2D/ tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran 100 % kepada CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI Rp. sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melalui Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI;
 - Bahwa AHMAD BAHRIN, SKM,MH Als BAHRIN Bin ALI AHMAD selaku kepala Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Hikmah Mandiri tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Concong Luar;
 - Bahwa RABUAN Bin LANGAN selaku kepala Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Panglima Raja;

Hal.15 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, bersama-sama dengan Ir. H. SARPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO, Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG, GUNTUR AS Bin MUKMIN A, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL dan YAYA DAMAYANTI sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain yaitu GUNTUR AS Bin MUKMIN A, HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN dan KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN ataupun memperkaya korporasi dalam hal ini CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah uang tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-645/PW04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai SP2D Rp. 123.258.500,00
 - Potongan pajak :
 - PPN Rp. 11.205.318,00
 - PPh Pasal 22 Rp. 1.680.798,00
- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------------------|
| Nilai fisik pekerjaan | Rp. | 0,00 |
| Jumlah kerugian keuangan negara | Rp. | 110.372.384,00 |

----- Perbuatan **terdakwa NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa **terdakwa NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.166/ III/HK-2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800 / DKP-SET/374, tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang – Jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, SULASMI Binti H.SAMSUDIN, MUHAMMAD FADHIL, SE Als FADHIL Bin TABRI, YAYA DAMAYANTI Als YAYA Binti LISGANI selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Bunga No.12 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Hal.17 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 pengesahan tanggal 8 November 2012 kegiatan/ pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kab. Inhil. Bahwa Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat / pihak ketiga sebagai berikut :
 1. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
 2. Desa Concong Luar Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
 4. Desa Panglima Raja Kecamatan Concong berupa 15 (lima belas) Piece Gill Net sebesar Rp.6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan tugas dan tanggung jawab :
 - 1 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN membuat 2 (dua) buah Proposal Permohonan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompong 5 GT lengkap Nomor : 40/UMD-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA Desa Panglima Raja Kecamatan Concong dan Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT lengkap Nomor : 41/UHM-PR/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dibuat pada tanggal dan bulannya tidak ingat lagi pada tahun 2012, namun ke 2 (dua) proposal tersebut dibuat tertanggal 12 November 2011 supaya seolah-olah pengajuan dan pembuatan proposal dibuat dan diajukan pada tahun 2011 untuk diserahkan kepada Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG untuk diproses;

- Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A membuat Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI atas perintah KARTIKA RONI sedangkan HERMANSYAH Als UCOK Bin H. MUHAMMAD HASAN mengusulkan kepada GUNTUR AS Bin MUKMIN A tentang Struktur Ketua dan Sekretaris dalam kepengurusan Kelompok Usaha Bersama tersebut, namun dalam kenyataannya Kelompok Usaha Bersama dengan nama USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI SEJAHTERA dan USAHA KELOMPOK HIKMAH MANDIRI tidak ada Ketua dan Anggotanya;
- Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A menyiapkan administrasi Surat Penawaran beserta lampirannya yaitu :
 1. Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Bapak Pajabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA.2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran Nomor : 01 / NNP- RGT / VIII /2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;

Hal.19 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik dan Tidak Termasuk daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 5. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 6. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 7. Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Pakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
 8. Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Pernyataan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO;
- Bahwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A setelah selesai membuat administrasi bertemu dengan SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyerahkan Profil Perusahaan CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dalam kegiatan/pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);
 - Bahwa Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir memerintahkan kepada SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN untuk segera memproses kegiatan/pekerjaan Pengadaan



Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kec. Concong, Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan aspirasi KARTIKA RONI (Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Fraksi Golkar periode 2009 sampai dengan 2014);

- Bahwa terhadap DPPA-SKPD tersebut pada tanggal 25 Juni 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. H. SARIPEK, M.P. Bin H. DAENG SITOBO mengajukan Surat Usulan Penerimaan Hibah Barang Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati Inhil dengan Nomor Surat : 523 / DKP – Set / 2012 / 592. Diantara penerima hibah barang tersebut adalah Kelompok Nelayan Usaha Hikmah Mandiri (Desa Concong Luar) dan Kelompok Nelayan Usaha Mandiri Sejahtera (Desa Panglima Raja), masing-masing kelompok akan mendapatkan Kapal Motor 5 GT dan Gill Net 30 Piece dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.123.258.500,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun demikian tidak pernah dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat Nomor :904/DKP-KP/P4/VIII/2012 /64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 kepada SYAFRIZAL,A.Md Als IJAL Bin FACHRUDIN;
- Bahwa SYAFRIZAL,A.Md Als IJAL Bin FACHRUDIN setelah menerima surat Nomor :904/DKP-KP/P4/VIII/2012 /64, tanggal 7 Agustus 2012 Perihal pengadaan langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) unit dan Gill Net 30 Piece untuk lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar kecamatan Concong Kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tahun Anggaran 2012 membuat dan melaksanakan:

1.Mengirimkan undangan kepada Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor : 19 /PPBBJ/DKP-KP /P4/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil,tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

Hal.21 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



2. Daftar pengambilan dokumen pengadaan langsung oleh Direktur kepada pejabat pengadaan dengan surat nomor 60 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam surat nomor 60 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 10 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
3. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
4. Lampiran Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Lampiran Berita Acara Aanwijzing yaitu BUDI RAHARJO;
5. Memberikan penjelasan pekerjaan / Anwijzing kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai dan membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor: 101 /PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dengan Nomor: 101 /PPBJ-DKP-KP/P4/VIII/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
6. Pemasukan Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor : 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Penawaran dari Penyedia barang dan jasa dari CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan surat Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Perihal Penawaran paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
7. Berita acara pembukaan penawaran CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor: 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 8. Undangan untuk Evaluasi penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi harga, Nomor : 224 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 265 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/ 2012 yang ditandatangani GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 265 /PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/ 2012, tanggal 24 Agustus 2012 yaitu BUDI RAHARJO, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 10. Membuat Berita Acara Hasil pengadaan Langsung Nomor : 306/ PPBJ-/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, tanggal 24 Agustus 2012, Untuk paket kegiatan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 11. Penetapan Pemenang untuk CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebagai Penyedia Barang : Dengan nomor surat, Nomor: 347/ TPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Indragiri Hilir di Tembilahan, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;
 12. Pengumuman Pengadaan langsung: Dengan Surat Nomor : 388/PPBJ, /DKP-KP/P4/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan

Hal.23 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Perikanan (Dana APBD) di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak pernah dilaksanakan dan hanya dibuat untuk kelengkapan administrasi;

- Bahwa Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan GUNTUR AS Bin MUKMIN A, namun yang tertera dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 yaitu BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012 nilai kontrak sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012;
- Bahwa setelah CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI ditetapkan sebagai penyedia barang, tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kec. Concong Kab. Inhil sebagaimana yang diatur dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012;
- Bahwa SULASMI selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris bersama sama dengan YAYA DAMAYANTI selaku Anggota yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290 tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012, dengan tugas dan wewenang yaitu :
 - 1 Melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam kontrak.
 - 2 Menerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - 3 Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



- 4 Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan
- Bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI mengirimkan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03 / NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/ NNP-RGT/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 telah mencapai pekerjaan dengan bobot 100 % (seratus persen) dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa kemudian SULASMI selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 dan MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris bersama-sama dengan YAYA DAMAYANTI selaku Anggota melakukan pemeriksaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang dilaksanakan oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 904/PPHP/XII/2012/60 tanggal 4 Desember 2012;
 - Bahwa pada Bulan Desember 2012, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bersama-sama dengan terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan di dampingi GUNTUR AS Bin MUKMIN A melakukan pemeriksaan lapangan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di tempat Pembuatan Kapal tepatnya di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada kenyataannya dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tidak dapat memberikan dan atau menunjukan dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP – KP / P4 / IX / 2012 / SPK-66 tanggal 7 September 2012, namun demikian Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI tetap mengirimkan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 04 / NNP – RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan sehingga dikeluarkanlah Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan Nomor : 05/NNP-RGT/XII/2012 tanggal 5

Hal.25 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Tim PPHP dan Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tanda tangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A;

- Bahwa Berdasarkan Surat Nomor : 06 / NNP-RGT/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 (tiga puluh) Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong atas Nama BUDI RAHARJO selaku direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI yang tandatangannya dipalsukan oleh GUNTUR AS Bin MUKMIN A, selanjutnya GUNTUR AS Bin MUKMIN A mengirimkan surat kepada terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kemudian terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyiapkan administrasi Pembayaran antara lain :
 1. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012.
 2. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012.
 3. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014.
 4. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012.
 5. Spesifikasi teknis Kegiatan.
 6. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan pekerjaan.
 7. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS).
 8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengetahui adanya kekurangan spesifikasi berupa dokumen kapal seperti Surat Gran, Sertifikat dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan pemeriksaan di Desa Pungkat dan di Desa Pekan Kamis, atas perintah Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menerbitkan Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012 .

- Bahwa perbuatan terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO, Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG, GUNTUR AS Bin MUKMIN A, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL dan YAYA DAMAYANTI melanggar ketentuan sebagai berikut :

- 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir nomor : 800/DKP-SET/373 tanggal 20 April 2012, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) angka :

1 Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

2 Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;

- 2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) berbunyi:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- 3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) berbunyi:

“pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

- 4 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 60 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

- 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pasal 6 yaitu :

Hal.27 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya pengadaan barang/jasa*
 - e Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa*
 - g Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*
- 6 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (1) berbunyi:
“Keuagandaerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”
- 7 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) berbunyi:
“Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil”
- 8 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) berbunyi:
“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- 9 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (2) berbunyi:
“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp. 123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipotong PPN 10 % (sepuluh persen) sebesar Rp. 11.205.318,00 (sebelas juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan PPN pasal 22 2 % (dua persen) sebesar Rp.1.680.798,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI menjadi sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan melampirkan dokumen antara lain :

1. Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
2. Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68 tanggal 10 Desember 2012
3. Ringkasan Kontrak Tanggal 14 Desember 2012
4. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2014
5. Rincian Penggunaan dana tanggal 14 Desember 2012
6. Spesifikasi teknis Kegiatan
7. Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan yang mengikuti Anwijzing / Penjelasan pekerjaan.
8. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung(LS)
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2014 sebesar Rp.123.258.500,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
10. Surat Kelengkapan Dokumen Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
11. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO selaku Pengguna Anggaran
12. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.123.258.500 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal.29 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Hj.JAHRONA HARAHAP, S.Sos, MM menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11394/SP2D/ tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran 100 % kepada CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI Rp. sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 (dua) Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong untuk kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 melalui Rekening BANK BNI Kantor Cabang Rengat Nomor Rekening 0206341595 atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI;
- Bahwa AHMAD BAHRIN, SKM,MH Als BAHRIN Bin ALI AHMAD selaku kepala Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Hikmah Mandiri tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Concong Luar;
- Bahwa RABUAN Bin LANGAN selaku kepala Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) Unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir serta nama Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera tidak ada di Dalam Masyarakat Desa Panglima Raja;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan terdakwa **NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, bersama-sama dengan Ir. H. SARIPEK, MP Bin H. DAENG SITOBO,Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG, GUNTUR AS Bin MUKMIN A, SULASMI, MUHAMMAD FADHIL dan YAYA DAMAYANTI sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menguntungkan orang lain yaitu GUNTUR AS Bin MUKMIN A, HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN dan KARTIKA RONI, S.Ag. Alias RONI Bin ARIFFURAHMAN ataupun menguntungkan korporasi dalam hal ini CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah uang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-645/PW04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

• Nilai SP2D	Rp.	123.258.500,00
• Potongan pajak :	Rp.	12.886.116,00
• PPN	Rp.	11.205.318,00
• PPh Pasal 22	Rp.	1.680.798,00
	Rp.	110.372.384,00
Nilai fisik pekerjaan	Rp.	0,00

- Jumlah kerugian keuangan negara **Rp. 110.372.384,00**

----- Perbuatan **terdakwa NURSAHIR A.Md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDS-04/TMBIL/05/2015 tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Hal.31 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sebagaimana dalam dakwaan Primair.,

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.,
- 3 Membebaskan kepada terdakwa NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID oleh karena itu untuk membayar uang pengganti secara bersama – sama dengan saksi Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG, saksi SYAFRIZAL, A.md Als IJAL Bin FACHRUDIN saksi SULASMI saksi MUHAMMAD FAHDLI saksi YAYA DAMAYANTI saksi GUNTUNG AS Bin MUKMIN.A saksi HERMANSYAH Als UCOK Bin H.MUHAMMAD HASAN dan saksi Ir H.SARIPEK, M.P (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp.110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan apabila mereka terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal mereka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 Di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Reth, Concong, Teluk Belengkong Nomor : 01/INSP/PEMTAK /II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 Tanggal, 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIYANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, Tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.
- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat nomor : 700/Insp-Set/IV/2014 /159.4 Tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat Nomor : 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang di tandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290, Tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang di tandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.

Hal.33 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/374 Tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIEK berserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 Tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja Dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV.Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui Untuk dan atas nama Penyedia CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK : 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Untuk dan Atas Nama Penyedia Barang CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta Stándar Ketentuan Dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Lansungg Nomor : 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 306/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYARIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi Dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi Dan Negoisasi Harga Nomor : 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang

Hal.35 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi Dan Negosiasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 183/ PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor : 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Indragiri Hilir Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Aanwijzing / Penjelasan Nomor : 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat Dan Rekanan Yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor : 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012

Hal.37 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Ir. MARDUAN

- Dokumen Spesifikasi Teknis Dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR,A.Md, Diperiksa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kuantitas Dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pencairan dana :
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang mendatangi oleh Atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor: 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 Jumlah Dana Rp.123.258.500,- tanggal 14 Desember 2012 yang mendatangi oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
 - 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece Di Desa Panglima Raja Dan desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR,A.Md Pihak Kedua
Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui
Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang di Tandatangi / Paraf oleh SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

Hal.39 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang Menerima BUDI RAHARJO Diketahui / Disetujui Oleh Pengguna Anggaran Ir.H.SARIPEK,MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 06/ NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 07/NNP-RGT/XII/ 2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YAN.E dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec.Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRAIN,SKM.MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec.Concong beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.69 / III / HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.212 / IV / HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 Tanggal 25 juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H.SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.380 / VII / HK-2012 Tanggal 30 juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H.ROSMAN MALOMO berserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPK1 - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa

Hal.41 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 Tgl 09 April 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI /2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/ 20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh

Hal.43 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.

- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIEPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan yang menerima ADRIAN,ST Direktur PT. Timba Sagara EC.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b Tgl 14 Nopember 2012 yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tagihan Invoice No.01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN dan yang menerima Ir.UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

Hal.45 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.

- 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.ARDANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDANSYAH.
- 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. ARDANSYAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.
 - 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten

Hal.47 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Ir.H.SARIEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.

- 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIEK.
- 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIEK.
- 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. SITI HAMSINAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIEK.
- 4 (empat) Buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor : SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor :KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, Tentang Pengangkatan Dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon III.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Juli S/D 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Agustus S/D 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 September S/D 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV.SURYA INERSIA Periode 26 Oktober S/D 18 Nopember 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir.UNTUNG SURYADI.
- (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran CV.Nyiur Nusantara Permai No. Rekening : 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan dalam berkas perkara terpisah, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening : 108-00-1254602-5
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening : 108-00-1231725-2
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang di tanda tangani dan di cap oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang di usulkan pada APBD 2012.

Hal.49 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain yg di periksa secara terpisah,

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tututan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 24 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan dan memohon sebagai berikut :

- 1 Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID
- 2 Menyatakan menurut Hukum bahwa TedakwaNURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMIDtidak Terbukti melanggar pasal 2(1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .
- 3 Membebaskan TedakwaNURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMIDdari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 4 Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada Harkat dan Martabat semula karena terdakwa adalah seorang Pehawai Negeri sipil.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 1 September 2015 Nomor : 52/Pid.Sus – TPK/2015/PN.Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1(satu) bulan kurungan*;
- 5 Menghukum Terdakwa bersama-sama saksi-saksi **IR.MARDUAN BIN RAJA ANANG, SYAFRIZAL., Amd Als IJAL Bin FACHRUDDIN, M.FADIL, NURSAHIR, SULASMI, YAYA DAMAYANTI, GUNTUR, dan HERMANSYAH** mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 110.372.384,- (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan Puluh Empat Rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Para Terdakwa dan saksi Ir.Marduan Bin Raja Anang, dkk kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara
- 6 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening : 108-00-1254602-5
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening : 108-00-1231725-2
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2
 - 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang di tanda tangani dan di cap oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI yang telah di legalisir.
 - 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang di usulkan pada APBD 2012;

Hal.51 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti lain di sita dalam berkas perkara terpisah dengan tersangka Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG dengan berkas perkara Nomor : BP / 48 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 02 September 2014.

- (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 Di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor : 01/INSP/PEMTAK /II/2013 Tanggal : 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 090/IsP-Set/ST/XII/2012/182 Tanggal, 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIYANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, Tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.
- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat nomor : 700/Insp-Set/IV/2014 /159.4 Tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat Nomor : 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang di tandatangi oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.
- 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290, Tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang di tandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/374 Tanggal 20 April

Hal.53 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK berserta lampirannya.

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 Tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja Dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV.Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui Untuk dan atas nama Penyedia CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK : 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Untuk dan Atas Nama Penyedia Barang CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta Stándar Ketentuan Dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).
 - 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Lansungg Nomor : 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 306/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYARIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi Dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Harga Nomor : 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi Dan Negosiasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 183/ PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor : 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16

Hal.55 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Aanwijzing / Penjelasan Nomor : 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat Dan Rekanan Yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor : 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Ir. MARDUAN
- Dokumen Spesifikasi Teknis Dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis

Hal.57 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) NURSAHIR,A.Md, Diperiksa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, beserta lampirannya.

- 1 (satu) Lembar Daftar Kuantitas Dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pencairan dana :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang mendatangi oleh Atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor: 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 Jumlah Dana Rp.123.258.500,- tanggal 14 Desember 2012 yang mendatangi oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece Di Desa Panglima Raja Dan desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NURSAHIR,A.Md Pihak Kedua Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang di Tandatangani / Paraf oleh SYAMSUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang Menerima BUDI RAHARJO Diketahui / Disetujui Oleh Pengguna Anggaran Ir.H.SARIPEK,MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN.

Hal.59 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 06/ NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 07/NNP-RGT/XII/ 2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YAN.E dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec.Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHIRIN,SKM.MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec.Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.69 / III / HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.212 / IV / HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.

- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 Tanggal 25 juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H.SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.380 / VII / HK-2012 Tanggal 30 juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H.ROSMAN MALOMO beserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPK1 - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil

Hal.61 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 Tgl 09 April 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/ 20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIEK.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR

Hal.63 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan yang menerima ADRIAN,ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b Tgl 14 Nopember 2012 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tagihan Invoice No.01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN dan yang menerima Ir.UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat

Hal.65 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :
 - a (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.
 - b 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.ARDANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDANSYAH.
 - d 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - e 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - f 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. ARDANSYAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - g 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.

i 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

j 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An.SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.

k 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

l 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

m 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. SITI HAMSINAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 4 (empat) Buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

Hal.67 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor : SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor :KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, Tentang Pengangkatan Dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon III.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Juli S/D 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Agustus S/D 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 September S/D 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV.SURYA INERSIA Periode 26 Oktober S/D 18 Nopember 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir.UNTUNG SURYADI.
- (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran CV.Nyiur Nusantara Permai No. Rekening : 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 9 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 7 September 2015 dihadapan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/ 2015/PN.PBR dan permintaan banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus// 2015/PN.Pbr yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 10 September 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 September 2015, dan memori banding ini telah diberitahukan/diserahkan satu rangkap kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus//2015/PN.Pbr yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada selama 7 (tujuh) hari kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2015 Nomor : W4.U1/2913/HK.01.TPK/X/2015 Perihal : Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaan sebagaimana dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah juga diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan, belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu mohon putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya semua dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori

Hal.69 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding nya seyogyanya ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya memuat hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, hanya saja Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.110.372.384,- ;

Menimbang, bahwa pembebanan uang pengganti tersebut telah jelas diatur Didalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan ” Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ” ;

Menimbang, bahwa melihat definisi uang pengganti tersebut dikaitkan dengan perkara aquo dimana Terdakwa sama sekali tidak memperoleh/menikmati hasil daripada perbuatannya dan juga tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa memperoleh harta dari perbuatan itu, oleh karenanya pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa tidaklah tepat dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 September 2015 Nomor : 52/PID.SUS-TPK/2015/PN.Pbr tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar tentang penjatuan hukuman uang pengganti sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan dan berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015, sekedar mengenai penjatuhan hukuman uang pengganti sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
 4. Menghukum Terdakwa **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 5 Menghukum pula Terdakwa **NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID** dengan hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan ;
 - 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 7 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening : 108-00-1254602-5
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening : 108-00-1231725-2

Hal.71 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang di tanda tangani dan di cap oleh CV.NYIUR NUSANTARA PERMAI yang telah di legalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang di usulkan pada APBD 2012;
Barang Bukti lain di sita dalam berkas perkara terpisah dengan tersangka Ir. MARDUAN Bin RAJA ANANG dengan berkas perkara Nomor : BP / 48 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 02 September 2014.
 - (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 Di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Reteh, Concong, Teluk Belengkong Nomor : 01/INSP/PEMTAK /II/2013 Tanggal : 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Nomor : 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 Tanggal, 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIYANTI,SH,MH.
 - 1 (satu) Lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, Tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.
 - 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat nomor : 700/Insp-Set/IV/2014 /159.4 Tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIYANTI,SH,MH.
 - 1 (satu) Lembar Surat Inspektorat Nomor : 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj.IRIANTI,SH,MH.

- 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DKP-SET/290, Tanggal 26 Maret 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIEPEK.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang di tandatanganinya oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.
- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI.

Hal.73 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI Nomor : 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. NYIUR NUSANTARA PERMAI dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/374 Tanggal 20 April 2012 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 Tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja Dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV.Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui Untuk dan atas nama Penyedia CV.Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK : 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Untuk dan Atas Nama Penyedia Barang CV.Nyiur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO berserta Stándar Ketentuan Dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Lansung Nomor : 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 306/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYARIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi Dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi Dan Negoisasi Harga Nomor : 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi Dan Negoisasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh

Hal.75 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 183/ PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md berserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor : 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor : 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur Cv. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik Dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Aanwijzing / Penjelasan Nomor : 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL,A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO berserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat Dan Rekanan Yang Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor : 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor : 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Kepada Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL,A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.

Hal.77 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil Ir. MARDUAN
- Dokumen Spesifikasi Teknis Dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR,A.Md, Diperiksa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, beserta lampirannya.
- 1 (satu) Lembar Daftar Kuantitas Dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Pencairan dana :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang mendatangani oleh Atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor: 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100 % Barang dan Jasa Tahun 2012 Jumlah Dana Rp.123.258.500,- tanggal 14 Desember 2012 yang mendatandatangani oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Dan Gill Net 30 Piece Di Desa Panglima Raja Dan desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR,A.Md Pihak Kedua Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang di Tandatangani / Paraf oleh SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, Tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.

Hal.79 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang Menerima BUDI RAHARJO Diketahui / Disetujui Oleh Pengguna Anggaran Ir.H.SARIPEK,MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 06/ NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa nomor : 07/NNP-RGT/XII/ 2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV.Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YAN.E dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kec.Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 904/DKP-KP /P4/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR,AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir.MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRAIN,SKM.MH selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kec.Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H.SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.69 / III / HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : KPTS.212 / IV / HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang di ajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 Tanggal 25 juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H.SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.380 / VII / HK-2012 Tanggal 30 juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H.ROSMAN MALOMO berserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPK1 - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT.TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.

Hal.81 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor : 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV.SURYA INERSIA.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 Tgl 09 April 2012 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/ 20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor : 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan Di Kab.Inhil Ta.2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.

Hal.83 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN,ST.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan yang menerima ADRIAN,ST Direktur PT. Timba Sagara EC.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kab.Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b Tgl 14 Nopember 2012 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ.JAHRONA HARAHAHAP,S.Sos.MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tagihan Invoice No.01,02,03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.MARDUAN dan yang menerima Ir.UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan Dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Lansung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H.SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Lansung Barang Dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR,A.M.d.

Hal.85 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN dan Pihak Kedua CV. SURYA INERSIA Direktur Ir.UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :
 - a (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.
 - b 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - c 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.ARDANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDANSYAH.
 - d 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- f 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. ARDIANSYAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- g 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :
 - h 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.Ir.MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H.SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir.MARDUAN.
 - i 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - j 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An.SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H.SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.
 - k 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - l 1 (satu) lembar surat Perintah nomor : 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - m 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir.MARDUAN 2. SITI HAMSINAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 4 (empat) Buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.

Hal.87 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor : SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor :KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, Tentang Pengangkatan Dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon III.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Juli S/D 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 Agustus S/D 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan CV.SURYA INERSIA Periode 26 September S/D 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Bundel Laporan Akhir CV.SURYA INERSIA Periode 26 Oktober S/D 18 Nopember 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran CV.Nyiur Nusantara Permai No. Rekening : 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 oleh kami Eddy Risdianto, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Kharlison Harianja, S.H.,MH dan Eddyman Naibaho, SH.,MH Hakim Ad Hoc sebagai Hakim –Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Kharlison Harianja, S.H.,MH

Eddy Risdianto, SH.,MH

Eddyman Naibaho, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Hal.89 dari 84 hal. Put.No.26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)